
**Nagari Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung: Saksi Sejarah Perjuangan
Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)**

Ahmad Fajri

Jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia
Email: ahmadfajri@isbiaceh.ac.id

ABSTRAK

KATA KUNCI:

*PDRI, Sumpur Kudus,
Silantai*

Penelitian ini membahas perjalanan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara di Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat pada tahun 1949. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Sumpur Kudus sebagai lokasi penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Syafruddin Prawiranegara, yang diberi mandat untuk membentuk pemerintahan sementara, memimpin perjalanan menuju Sumpur Kudus yang penuh tantangan, melintasi jalur darat dan sungai yang sulit dijangkau. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi langsung, penelitian ini mengungkapkan bahwa Sumpur Kudus bukan hanya tempat persinggahan, tetapi juga lokasi sidang kabinet PDRI yang membahas masa depan Republik Indonesia. Sidang ini memperlihatkan komitmen para pejuang untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Kesimpulannya, Sumpur Kudus memiliki peran vital dalam mempertahankan eksistensi Indonesia dan menjadi simbol semangat perjuangan bangsa yang perlu dilestarikan dalam sejarah Indonesia.

PENDAHULUAN

Kota Sumpur Kudus terletak di lembah Bukit Barisan di antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Berjarak sekitar 180 kilometer dari Kota Padang, 60 kilometer dari pusat Kabupaten Muaro Sijunjung, dan 30 kilometer dari pusat Kecamatan Kumanis. Namun, siapa yang mengira bahwa kampung halaman yang hancur itu memiliki banyak bekas sejarah yang harus digali dan dilestarikan. Lihat Raja Ibadat, PDRI, dan PRRI.

Di Sumpur Kudus, setiap era dan peristiwa telah meninggalkan ingatan dan ingatan unik. Di Sumpur Kudus, semua kenangan masa lalu masih diceritakan secara lisan. Namun sayangnya, akibat tidak terawat dan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah, banyak tempat penting di daerah Sumpur Kudus telah hilang seiring berkembangnya zaman. Peninggalan sejarah Sumpur Kudus mulai mendapat perhatian media dan pemerintah baru-baru ini. Selain itu, gelar pahlawan nasional baru-baru ini diberikan kepada almarhum Tuan Mohammad Rasyid. Nama Sumpur Kudus menjadi sangat populer. Karena PDRI telah menggunakan Sumpur Kudus sebagai markasnya selama sekitar tiga minggu dengan Mr. Mohammad Rasyid sebagai Gubernur Militer Sumatera Tengah pada saat itu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode Sejarah, melibatkan analisis peristiwa sejarah melalui rangkaian tindakan yang sistematis. Dimulai dengan mengumpulkan sumber sejarah primer dan sekunder, termasuk dokumen asli dan wawancara dengan saksi sejarah. Setelah itu, kritik sumber dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh asli dan kredibel. Setelah itu, sumber yang dapat diandalkan diperiksa dan ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya waktu itu. Setelah itu, data dari berbagai sumber digabungkan untuk membuat kisah sejarah yang lengkap. Ini disebut sintesis. Terakhir, sejarah ditulis secara objektif dan mencakup semua sumber yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian, yang kemudian diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara di Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan saksi sejarah yang berperan langsung dalam peristiwa tersebut, seperti Bapak Iriyanis dan Bapak Samsul Anwar, yang memberikan informasi tentang perjalanan PDRI dan kehidupan Syafruddin Prawiranegara di daerah tersebut. Selain itu, observasi langsung di lokasi juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi tempat yang menjadi saksi perjuangan PDRI. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berhasil mengungkapkan peran penting Sumpur Kudus sebagai lokasi strategis dalam sejarah perjuangan Indonesia, serta

bagaimana peran masyarakat setempat dalam mendukung kelangsungan perjuangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Seputar Sumpur Kudus

Sumpur Kudus, juga dikenal sebagai Makkah Darek, adalah wilayah yang terdiri dari beberapa nagari di bagian utara Kabupaten Sijunjung dan di bagian paling timur dari Sumatera Barat. Berjarak sekitar 180 km dari Kota Padang, 60 km dari ibu kota Kabupaten Muaro Sijunjung, dan 30 km dari ibu kota Kecamatan Kumanis. Sangat sedikit orang yang tahu tentang Sumpur Kudus. Perjalanan dari kota Muaro Sijunjung ke nagari Sumpur Kudus memakan waktu antara 3 dan 5 jam, tergantung pada cuaca dan kemampuan pengemudi. (Jasri, 2022) Selama perjalanan menuju Payakumbuh, jalan raya relatif mulus dan tidak banyak kelokan. Namun, setelah memasuki simpang menuju Sumpur Kudus, jalan menjadi sempit dan kondisinya kurang baik. Setelah masuk, mobil harus melalui jalan yang sempit dan berlubang, melintasi sisi pegunungan, dengan ancaman tanah longsor. Karena tebing di sisi jalan rawan longsor, pengendara tidak akan melintasi jalan tersebut jika hujan kecuali mereka yang nekat dan terburu-buru. Sebagai Wali Nagari Silantai dari tahun 2013 hingga 2019, Bapak Yusbardi Gindo Malano menjelaskan bahwa total penduduk Nagari Silantai adalah 2015 orang, terdiri dari 5 Jorong dan 615 Kepala Keluarga (KK). (Malano, 2018)

Nagari Silantai terletak di Sumpur Kudus. Desa Nagari Silantai terletak di lembah bukit barisan Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Desa itu terpencil dan tersembunyi. Nagari Silantai menyimpan cerita lama Indonesia. Pemerintah Darurat Indonesia (PDRI), dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara, dibentuk di sini. Karena lokasi tersebut sulit dijangkau dan dilalui oleh kendaraan pada masa itu, Belanda kesulitan menemukan nagari tersebut. (Ahmad, 2023)

B. Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Terbentuknya PDRI terjadi sekitar 77 tahun yang lalu ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia oleh Belanda. di mana musuh menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para menteri lainnya. Peristiwa tragis ini terjadi 19 Desember 1948. Sebelum ditangkap, mereka sempat berkumpul dan memberikan mandat kepada Syafrudin Prawiranegara untuk memimpin pemerintahan sementara

selama mereka di tahanan. Namun, Syafruddin Prawiranegara tidak pernah menerima mandat tersebut. Kemudian terdengar berita bahwa Belanda telah menduduki Ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pemimpin pemerintah Republik Indonesia. Pada sore harinya, Syafruddin Prawiranegara dan pengikutnya berangkat menuju Sumatera Barat untuk membentuk Pemerintahan Darurat, yang dimulai dari Halaban hingga Pekanbaru. Tempat bersejarah di mana PDRI mempertahankan Republik Indonesia adalah Sumpur Kudus.(Asnan, 2006)

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Menuju Nagari Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Menurut Bapak Iriyanis, seorang penjaga situs Cagar Budaya Rumah Sidang Kabinet PDRI (1949), dia sekarang berusia 56 tahun. Beliau adalah anak bungsu dari Hasan Basri, seorang wali perang. Bapak Iriyanis menjelaskan bagaimana Syafruddin Prawiranegara dan rombongannya pergi ke Desa Silantai Sumpur Kudus. Perjalanan ini berangkat dari Halaban ke Bangkinang (Pekanbaru). Perjalanan ini dilakukan karena pada saat itu terdengar kabar bahwa Kota Bukittinggi telah diambil oleh Belanda, sehingga Syafruddin harus pergi ke Pekanbaru, tepatnya melewati Bangkinang. Setelah tiba di Bakinang, rombongan PDRI mendapati bahwa Bangkinang juga telah dikuasai oleh Belanda. Mereka harus berpindah ke Teluk Kuantan. (Iriyanis, 2018)

Setelah berangkat dari Bangkinang, dia kemudian melewati Taratak Buluah, Sungai Pagar, Lipek Kain, Muaro Lembuh, Teluk Kuantan, RT Karing, Iliran Jao, Pulau Punjung, dan kemudian menuju Sungai Darek. Rombongan melalui Dusun Pulau Gadang, Pulau Panjang, Batu Gajah, Ombak Kubu, Pulau Serang, Dusun Tengah, Abai Sanyir, dan Bidar Alam di wilayah Sungai Darek. Karena Belanda telah tiba di Muaro Labuah, Syafrudin Prawiranegara dan rombongan tinggal di daerah tersebut selama sekitar dua bulan. Karena kondisi jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan, mereka memutuskan untuk pergi ke Sumpur Kudus. Pada awalnya, Syafruddin Prawiranegara beserta rombongan pergi dengan perahu, tetapi karena arus sungai terlalu deras, mereka akhirnya harus berjalan kaki ke darat. Tidak ada kendaraan di tempat itu, dan rute menuju Sumpur Kudus juga sulit dilalui oleh kendaraan darat.(Erasiah, 2018)

C. Sidang Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Nagari Silantai, Sumpur Kudus, Sumatera Barat

Kabinet PDRI mengadakan sidang paripurna di Sumpur Kudus dari 14 hingga 17 Mei 1949. Menurut Bapak Iriyanis saat diwawancarai, peserta sidang tersebut termasuk semua anggota PDRI beserta stafnya, anggota militer dan kepolisian, kepala jabatan, gubernur militer Sumatera Tengah beserta stafnya, dan pemimpin partai politik yang tersebar di seluruh Sumatera. Saat sidang dimulai, pembicara termasuk Sultan Muhammad Rasyid, Gubernur Militer Sumatera Tengah saat itu; Muhammad Nasrum, koordinator Provinsi Sumatera Tengah; Ir. Indra Caya; Rusli Rahim; Joni Muhammad; Batarudin; dan Muhammad Nasir, Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia.(Iriyanis, 2018)

Semua orang dalam sidang yang membahas hasil perjanjian Roem-Royen dan menentang perjanjian tersebut. Setelah itu, mereka semua setuju bahwa lebih baik melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan daripada menerima keputusan Roem-Royen.



Gambar 1: Rumah tempat Sidang Kabinet PDRI, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

D. Kehidupan Sehari-hari Syafruddin Prawiranegara di Nagari Silantai, Kabupaten Sijunjung

Sebagai saksi dari perjalanan PDRI di nagari Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Bapak Samsul Anwar, yang berusia 82 tahun, Anaknya bernama Nusun, Sekretaris Perang. Berbicara tentang situasi dan kondisi kehidupan Syafrudin Prawiranegara pada saat itu, dia menceritakannya. Bapak Samsul Anwar, yang saat itu berusia 13 tahun, hampir setiap hari mengunjungi Bapak Syafrudin Prawiranegara untuk mendengarkan radio, karena pada saat itu tidak ada radio di Nagari Silantai.(Anwar, 2018)

Orang-orang di sekitar Syafrudin Prawiranegara tahu bahwa dia baik hati dan ramah. Sifat ramah dan baik hati beliau disukai oleh semua warga. Beliau menginap atau bermalam di Mushollah keluarga Bapak Samsul Anwar di Nagari Silantai. Di Mushola, dia bersama dengan beberapa anggota lainnya, seperti Letnan Kolonel Adam dari Angkatan Laut, Idris Batang Karis dari Pegawai Negeri Perdagangan, dan Pegawai Tinggi Koperasi Rusli Rahim dari Pariaman.

Datuak Magek Kerajaan (Staff Ahli Perang) adalah saksi lain yang menyaksikan peristiwa PDRI selain saksi sejarah Bapak Syamsul Anwar. Bapak Samsul Anwar mengklaim bahwa dia masih hidup. Kemudian Ibu Jamaria, Kepala Dapur Umum, masih hidup sampai sekarang. Selama berada di sana, Syafruddin Prawiranegara menulis buku "Islam dalam Pergolakan Dunia", yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1949 dan kemudian dicetak lagi pada tahun 1950. Buku ini merupakan penghormatan Syafruddin Prawiranegara kepada Hasan Basri, Wali Perang saat itu. Selain itu, ada beberapa aktivitas masyarakat yang biasanya termasuk bermain bola voly, menjalankan acara kesehatan, dan mengirimkan berita politik dari Bidar Alam oleh Jenderal Sudirman ke Maramis (Menteri Luar Negeri di India). Selain itu, Wali Perang melakukan aktivitas lain bersama masyarakat, termasuk menyediakan makanan kepada rombongan Syafruddin Prawiranegara. Pada saat itu, desa Silantai meminta bantuan dari desa-desa tetangganya jika kebutuhannya tidak mencukupi. Pada saat itu, Syafruddin Prawiranegara sempat bertugas sebagai Khatib di Mushola dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Terakhir, pada tahun 1975, Syafruddin Prawiranegara memiliki kepentingan di Sawah Lunto. Pada tahun yang sama, Hasan Basri juga diundang ke sana bersama Syafruddin Prawiranegara.(Anwar, 2018)

KESIMPULAN

Desa terpencil di lembah Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Nagari Silantai, Sumpur Kudus, menjadi saksi penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah ibu kota Yogyakarta diambil alih oleh Belanda, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di tempat ini pada tahun 1949. Untuk mencapai Sumpur Kudus, Syafruddin dan rombongannya menempuh perjalanan yang panjang dan sulit melalui sungai dan jalan darat. Sidang kabinet PDRI di Sumpur Kudus pada Mei 1949 menentukan nasib Republik Indonesia. Kehidupan sehari-hari Syafruddin Prawiranegara di Sumpur Kudus, selain peran strategisnya dalam sejarah Indonesia, menunjukkan hubungan dekatnya dengan masyarakat setempat yang mendukung perjuangan tersebut. Sumpur Kudus adalah simbol perjuangan dan tempat persinggahan yang harus dilestarikan sebagai bagian dari sejarah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Samsul. Wawancara dengan penulis, 2018.

Iriyanis. Wawancara dengan penulis, 2018.

Malano, Yusbardi Gindo. Wawancara dengan penulis, 2018.

Ahmad, Fajri. 2023. *"Karya Mestika Zed 'Somewhere in The Jungle, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia' dan Pentingnya Bagi Sejarah PDRI Serta Tokoh PDRI Dalam Sejarah Bangsa."* Disertasi, Universitas Andalas.

Asnan, Gusti. 2006. "PDRI Dalam Penulisan Sejarah Indonesia." *Makalah Disajikan pada Seminar Nasional "Meninjau Ulang PDRI dalam Sejarah dan Penulisan Sejarah Bangsa," Padang, 26.*

Erasiah, Erasiah. 2018. "Tinjauan Historiografi Buku Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Karya Mestika Zed." *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora* 22 (1): 29-42.

Jasri, Patri Domelia. 2022. "Peran Syekh Ibrahim Terhadap Islamisasi Masyarakat Sumpur Kudus Pada Abad Ke-16 M." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 28 (1): 24-39.

- Kahin, Audrey R. 1999. *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity*. Amsterdam: Amsterdam University Press. (Buku ini membahas peran Sumatera Barat, termasuk PDRI, dalam politik Indonesia).
- Rasyid, Mohammad. "Perjuangan PDRI di Sumatera." *Jurnal Sejarah Indonesia*, 2019.
- Setiawan, Haryanto. *Sejarah Perjuangan PDRI di Sumatera Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang Press, 2015.
- Sudirman, Jenderal. "Surat-surat untuk PDRI: Pengalaman dan Refleksi." *Penerbit Sejarah Indonesia*, 2021.
- Zed, Mestika. 2001. *Somewhere in the Jungle: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.